



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1084, 2022

KEMENKUMHAM. Tunjangan Kinerja. Perubahan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perubahan kebijakan pemerintah membuat regulasi pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dinilai belum sesuai dengan kebijakan pemerintah terkini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 272);

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

5. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 274);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Wakil Menteri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1412);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 100);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1083);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pusat yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 900);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
4. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
5. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun.
6. Jam Kerja adalah rentang waktu Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan

keterampilan baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan yang pembiayaan studinya diberikan oleh lembaga/negara yang mendanai pelaksanaan Tugas Belajar dan tidak mengikat kecuali mengikuti sekolah kedinasan.

8. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.
 9. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
 10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 12. Wakil Menteri adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertugas membantu Menteri dalam melaksanakan tugas Kementerian.
2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 5A dan Pasal 5B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Calon PNS yang dalam pengangkatan pertamanya sebagai pejabat fungsional, diberikan Tunjangan Kinerja setinggi-tingginya setara jabatan pelaksana dengan Kelas Jabatan 6 (enam).
- (2) Calon PNS yang dalam pengangkatan pertamanya sebagai pejabat fungsional atau pelaksana, namun nomenklatur jabatannya belum ditetapkan, diberikan jabatan dengan Tunjangan Kinerja setinggi-tingginya setara jabatan pelaksana dengan Kelas Jabatan 6 (enam).

Pasal 5B

Calon PNS yang telah diangkat sebagai PNS dan belum diangkat dalam jabatan fungsional, diberikan Tunjangan Kinerja setinggi-tingginya setara jabatan pelaksana dengan Kelas Jabatan 6 (enam).

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tunjangan Kinerja Pegawai yang dibebaskan dari tugas sehari-hari karena melaksanakan Tugas Belajar di luar sekolah kedinasan Kementerian, dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima.

- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar dalam jangka waktu pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. program Diploma I (D1) paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. program Diploma II (D2) paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. program Diploma III (D3) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. program Diploma IV (D4)/Strata I (S1) paling lama 4 (empat) tahun;
 - e. program Strata II (S2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - f. program Strata III (S3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun.
 - (3) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun/2 (dua) semester sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan/atau instansi.
 - (4) Dalam hal Pegawai melaksanakan perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima.
4. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 11A, sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Tunjangan Kinerja Pegawai yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya serta pendanaannya bersumber dari APBN maupun nonAPBN dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya.
- (2) Tunjangan Kinerja Pegawai yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya dan tidak melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari selama menjalani masa Tugas Belajar, serta pendanaannya bersumber dari APBN maupun nonAPBN dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya.
- (3) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar dalam jangka waktu pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. program Diploma I (D1) paling lama 1 (satu) tahun;

- b. program Diploma II (D2) paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. program Diploma III (D3) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. program Diploma IV (D4)/Strata I (S1) paling lama 4 (empat) tahun;
 - e. program Strata II (S2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun); dan
 - f. program Strata III (S3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun.
- (4) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun/2 (dua) semester sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan/atau instansi.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan atau cuti besar, Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus);
 - b. Pegawai yang melaksanakan cuti besar, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut:
 1. periode pembayaran bulan pertama sebesar 50% (lima puluh per seratus);
 2. periode pembayaran bulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima per seratus); dan
 3. periode pembayaran bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh per seratus).
 - (2) Dihapus.
6. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Dalam hal terjadi pengangkatan dan perubahan jabatan, penyesuaian Tunjangan Kinerjanya dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas.

8. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 22A dan Pasal 22B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang terdampak penataan birokrasi diberikan dengan ketentuan:

- a. dalam hal akumulasi komponen penghasilan yang diterima mengalami penurunan, maka penghasilannya dibayarkan sebesar penghasilannya pada jabatan administrasinya.
- b. dalam hal akumulasi komponen penghasilan yang diterima lebih besar atau sama dengan besaran penghasilan pada saat menjadi pejabat administrasi, maka penghasilannya dibayarkan sesuai penghasilan yang diterima pada jabatan fungsionalnya.

Pasal 22B

- (1) Pembayaran selisih Tunjangan Kinerja bagi pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi diberikan terhitung sejak pejabat administrasi dialihkan dan dilantik menjadi pejabat fungsional.
- (2) Pembayaran selisih Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian dan penghentian pembayaran penghasilan pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi bagi pegawai negeri sipil di instansi pusat yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

9. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
KETENTUAN PERALIHAN

10. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 24A dan Pasal 24B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pegawai yang telah menduduki Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, pembayaran Tunjangan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelum dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Menteri ini sampai dengan selesai melaksanakan tugas dalam jabatannya sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24B

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diberhentikan karena alasan:

- a. diberhentikan sementara sebagai pns;
- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan
- d. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana yang tugas jabatannya selain pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya,

pada saat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, pembayaran Tunjangan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelum dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

11. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
 HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR
 10 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN
 PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN
 HAK ASASI MANUSIA

KELAS JABATAN DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

A. DAFTAR NAMA JABATAN MENTERI DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA

NO.	NAMA JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1	MENTERI	49.860.000

B. DAFTAR NAMA JABATAN WAKIL MENTERI DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA

NO.	NAMA JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1	WAKIL MENTERI	44.874.000

C. DAFTAR NAMA JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS, KELAS JABATAN, DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1	SEKRETARIS JENDERAL	17	33.240.000
2	KEPALA BIRO PERENCANAAN	15	19.280.000
3	KEPALA BAGIAN REFORMASI BIROKRASI	12	9.896.000
4	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN	12	9.896.000
5	KEPALA BAGIAN TATA LAKSANA DAN TATA USAHA	12	9.896.000
6	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
7	KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN	15	19.280.000
8	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN, SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAN TATA USAHA	12	9.896.000
9	KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI	12	9.896.000
10	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
11	KEPALA BIRO KEUANGAN	15	19.280.000
12	KEPALA BAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	12	9.896.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	DAN TATA USAHA		
13	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
14	KEPALA BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	12	9.896.000
15	KEPALA BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	15	19.280.000
16	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN BARANG MILIK NEGARA DAN TATA USAHA	12	9.896.000
17	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
18	KEPALA BAGIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA	12	9.896.000
19	KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG MILIK NEGARA	12	9.896.000
20	KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM, DAN KERJA SAMA	15	19.280.000
21	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
22	KEPALA BAGIAN LAYANAN ADVOKASI HUKUM DAN TATA USAHA	12	9.896.000
23	KEPALA BIRO UMUM	15	19.280.000
24	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
25	KEPALA BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN	12	9.896.000
26	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA MENTERI DAN WAKIL MENTERI	9	5.079.200
27	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA SEKRETARIS JENDERAL	9	5.079.200
28	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA STAF AHLI DAN STAF KHUSUS MENTERI	9	5.079.200
29	KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA DAN TATA USAHA	12	9.896.000
30	KEPALA SUBBAGIAN URUSAN DALAM	9	5.079.200
31	KEPALA SUBBAGIAN KENDARAAN DAN PERJALANAN DINAS	9	5.079.200
32	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN PENGAMANAN	12	9.896.000
33	KEPALA SUBBAGIAN ACARA DAN TAMU PIMPINAN	9	5.079.200
34	KEPALA SUBBAGIAN KEPROTOKOLAN	9	5.079.200
35	KEPALA SUBBAGIAN PENGAMANAN PIMPINAN	9	5.079.200
36	KEPALA SUBBAGIAN PENGAMANAN LINGKUNGAN, INSTALASI, DOKUMEN, DAN JALUR INFORMASI	9	5.079.200
37	KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	15	19.280.000
38	KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM	12	9.896.000
39	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
40	INSPEKTUR JENDERAL	17	33.240.000
41	SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL	15	19.280.000
42	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	9.896.000
43	KEPALA BAGIAN UMUM	12	9.896.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
44	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9	5.079.200
45	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9	5.079.200
46	INSPEKTUR WILAYAH I	15	19.280.000
47	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
48	INSPEKTUR WILAYAH II	15	19.280.000
49	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
50	INSPEKTUR WILAYAH III	15	19.280.000
51	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
52	INSPEKTUR WILAYAH IV	15	19.280.000
53	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
54	INSPEKTUR WILAYAH V	15	19.280.000
55	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
56	INSPEKTUR WILAYAH VI	15	19.280.000
57	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
58	DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI	17	33.240.000
59	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	15	19.280.000
60	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	9.896.000
61	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	9.896.000
62	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	9.896.000
63	KEPALA BAGIAN UMUM	12	9.896.000
64	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9	5.079.200
65	DIREKTUR LALU LINTAS KEIMIGRASIAN	15	19.280.000
66	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
67	DIREKTUR IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	15	19.280.000
68	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
69	DIREKTUR INTELJEN KEIMIGRASIAN	15	19.280.000
70	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
71	DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	15	19.280.000
72	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
73	DIREKTUR KERJA SAMA KEIMIGRASIAN	15	19.280.000
74	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
75	DIREKTUR SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	15	19.280.000
76	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
77	DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN	17	33.240.000
78	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	15	19.280.000
79	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	9.896.000
80	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	9.896.000
81	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	9.896.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
82	KEPALA BAGIAN UMUM	12	9.896.000
83	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9	5.079.200
84	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9	5.079.200
85	DIREKTUR KEAMANAN DAN KETERTIBAN	15	19.280.000
86	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
87	DIREKTUR PERAWATAN KESEHATAN DAN REHABILITASI	15	19.280.000
88	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
89	DIREKTUR PELAYANAN TAHANAN DAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA	15	19.280.000
90	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
91	DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KERJA SAMA	15	19.280.000
92	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
93	DIREKTUR BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PENGENTASAN ANAK	15	19.280.000
94	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
95	DIREKTUR PEMBINAAN NARAPIDANA DAN LATIHAN KERJA PRODUKSI	15	19.280.000
96	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
97	DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	17	33.240.000
98	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	15	19.280.000
99	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	9.896.000
100	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	9.896.000
101	KEPALA BAGIAN UMUM	12	9.896.000
102	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9	5.079.200
103	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9	5.079.200
104	DIREKTUR PERDATA	15	19.280.000
105	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
106	DIREKTUR PIDANA	15	19.280.000
107	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
108	DIREKTUR TATA NEGARA	15	19.280.000
109	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
110	DIREKTUR OTORITAS PUSAT DAN HUKUM INTERNASIONAL	15	19.280.000
111	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
112	DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI	15	19.280.000
113	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
114	DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	17	33.240.000
115	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL	15	19.280.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	KEKAYAAN INTELEKTUAL		
116	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	9.896.000
117	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	9.896.000
118	KEPALA BAGIAN UMUM	12	9.896.000
119	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9	5.079.200
120	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9	5.079.200
121	DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI	15	19.280.000
122	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
123	DIREKTUR PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG	15	19.280.000
124	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
125	DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS	15	19.280.000
126	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
127	DIREKTUR KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	15	19.280.000
128	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
129	DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL	15	19.280.000
130	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
131	DIREKTUR PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	15	19.280.000
132	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
133	DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA	17	33.240.000
134	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA	15	19.280.000
135	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	9.896.000
136	KEPALA BAGIAN UMUM	12	9.896.000
137	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9	5.079.200
138	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9	5.079.200
139	DIREKTUR PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT	15	19.280.000
140	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
141	DIREKTUR KERJA SAMA HAK ASASI MANUSIA	15	19.280.000
142	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
143	DIREKTUR DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA	15	19.280.000
144	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
145	DIREKTUR INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA	15	19.280.000
146	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
147	DIREKTUR FASILITASI DAN INFORMASI HAK ASASI MANUSIA	15	19.280.000
148	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
149	DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	17	33.240.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
150	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15	19.280.000
151	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	9.896.000
152	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	9.896.000
153	KEPALA BAGIAN UMUM	12	9.896.000
154	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9	5.079.200
155	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9	5.079.200
156	DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15	19.280.000
157	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
158	DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN I	15	19.280.000
159	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
160	DIREKTUR PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN, DAN PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15	19.280.000
161	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
162	DIREKTUR LITIGASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15	19.280.000
163	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
164	DIREKTUR FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PEMBINAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15	19.280.000
165	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
166	DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN II	15	19.280.000
167	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
168	KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	17	33.240.000
169	SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	15	19.280.000
170	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	9.896.000
171	KEPALA BAGIAN UMUM	12	9.896.000
172	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9	5.079.200
173	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9	5.079.200
174	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PELATIHAN TEKNIS DAN KEPEMIMPINAN	15	19.280.000
175	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
176	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PELATIHAN FUNGSIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA	15	19.280.000
177	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
178	KEPALA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI	15	19.280.000
179	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
180	DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN	15	19.280.000
181	WAKIL DIREKTUR I	14	17.064.000
182	WAKIL DIREKTUR II	14	17.064.000
183	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KETARUNAAN	12	9.896.000
184	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM POLITEKNIK PEMASYARAKATAN	12	9.896.000
185	KEPALA SUBBAGIAN AKADEMIK	9	5.079.200
186	KEPALA SUBBAGIAN KETARUNAAN	9	5.079.200
187	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	9	5.079.200
188	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	9	5.079.200
189	DIREKTUR POLITEKNIK IMIGRASI	15	19.280.000
190	WAKIL DIREKTUR I	14	17.064.000
191	WAKIL DIREKTUR II	14	17.064.000
192	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN PESERTA DIDIK POLITEKNIK IMIGRASI	12	9.896.000
193	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM POLITEKNIK IMIGRASI	12	9.896.000
194	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK POLITEKNIK IMIGRASI	9	5.079.200
195	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI PESERTA DIDIK POLITEKNIK IMIGRASI	9	5.079.200
196	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN POLITEKNIK IMIGRASI	9	5.079.200
197	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA POLITEKNIK IMIGRASI	9	5.079.200
198	KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	17	33.240.000
199	SEKRETARIS BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	15	19.280.000
200	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	9.896.000
201	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	9.896.000
202	KEPALA BAGIAN UMUM	12	9.896.000
203	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9	5.079.200
204	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9	5.079.200
205	KEPALA PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL	15	19.280.000
206	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
207	KEPALA PUSAT PERENCANAAN HUKUM NASIONAL	15	19.280.000
208	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
209	KEPALA PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL	15	19.280.000
210	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
211	KEPALA PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM	15	19.280.000
212	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
213	KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	17	33.240.000
214	SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA	15	19.280.000
215	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	9.896.000
216	KEPALA BAGIAN UMUM	12	9.896.000
217	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9	5.079.200
218	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9	5.079.200
219	KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM	15	19.280.000
220	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
221	KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA	15	19.280.000
222	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
223	KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN	15	19.280.000
224	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
225	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PENELITIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	15	19.280.000
226	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
227	KEPALA KANTOR WILAYAH	15	19.280.000
228	KEPALA DIVISI ADMINISTRASI	14	17.064.000
229	KEPALA BAGIAN UMUM	12	9.896.000
230	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, TATA USAHA, DAN RUMAH TANGGA	9	5.079.200
231	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA	9	5.079.200
232	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	12	9.896.000
233	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	9	5.079.200
234	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, REFORMASI BIROKRASI, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	9	5.079.200
235	KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN	14	17.064.000
236	KEPALA BIDANG PEMBINAAN, BIMBINGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	12	9.896.000
237	KEPALA SUBBIDANG BIMBINGAN DAN PENGENTASAN ANAK	9	5.079.200
238	KEPALA SUBBIDANG PEMBINAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN KERJA SAMA	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
239	KEPALA BIDANG PELAYANAN TAHANAN, KESEHATAN, REHABILITASI, PENGELOLAAN BENDA SITAAN, BARANG RAMPASAN NEGARA, KEAMANAN	12	9.896.000
240	KEPALA SUBBIDANG PENGELOLAAN BENDA SITAAN, BARANG RAMPASAN NEGARA, DAN KEAMANAN	9	5.079.200
241	KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN TAHANAN, PERAWATAN KESEHATAN, DAN REHABILITASI	9	5.079.200
242	KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN	14	17.064.000
243	KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN INFORMASI KEIMIGRASIAN	12	9.896.000
244	KEPALA SUBBIDANG PERIZINAN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
245	KEPALA SUBBIDANG INFORMASI KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
246	KEPALA BIDANG INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	12	9.896.000
247	KEPALA SUBBIDANG INTELIJEN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
248	KEPALA SUBBIDANG PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
249	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	14	17.064.000
250	KEPALA BIDANG PELAYANAN HUKUM	12	9.896.000
251	KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	9	5.079.200
252	KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	9	5.079.200
253	KEPALA BIDANG HUKUM	12	9.896.000
254	KEPALA SUBBIDANG FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH	9	5.079.200
255	KEPALA SUBBIDANG PENYULUHAN HUKUM, BANTUAN HUKUM, DAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM	9	5.079.200
256	KEPALA BIDANG HAK ASASI MANUSIA	12	9.896.000
257	KEPALA SUBBIDANG PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA	9	5.079.200
258	KEPALA SUBBIDANG PENGKAJIAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	9	5.079.200
259	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I	14	17.064.000
260	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	11	8.757.600
261	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	11	8.757.600
262	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN	9	5.079.200
263	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9	5.079.200
264	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
265	KEPALA BIDANG PEMBINAAN NARAPIDANA	11	8.757.600
266	KEPALA SEKSI REGISTRASI	9	5.079.200
267	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	9	5.079.200
268	KEPALA SEKSI PERAWATAN NARAPIDANA	9	5.079.200
269	KEPALA BIDANG KEGIATAN KERJA	11	8.757.600
270	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KERJA	9	5.079.200
271	KEPALA SEKSI SARANA KERJA	9	5.079.200
272	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN HASIL KERJA	9	5.079.200
273	KEPALA BIDANG ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	11	8.757.600
274	KEPALA SEKSI KEAMANAN	9	5.079.200
275	KEPALA SEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	9	5.079.200
276	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA	12	9.896.000
277	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9	5.079.200
278	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
279	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8	4.595.150
280	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
281	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK	9	5.079.200
282	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8	4.595.150
283	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PERAWATAN	8	4.595.150
284	KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA	9	5.079.200
285	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA DAN PENGELOLAAN HASIL KERJA	8	4.595.150
286	KEPALA SUBSEKSI SARANA KERJA	8	4.595.150
287	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	9	5.079.200
288	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8	4.595.150
289	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8	4.595.150
290	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA NARKOTIKA	12	9.896.000
291	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9	5.079.200
292	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
293	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8	4.595.150
294	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
295	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK	9	5.079.200
296	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8	4.595.150
297	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN	8	4.595.150

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	KEMASYARAKATAN DAN PERAWATAN		
298	KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA	9	5.079.200
299	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA DAN PENGELOLAAN HASIL KERJA	8	4.595.150
300	KEPALA SUBSEKSI SARANA KERJA	8	4.595.150
301	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	9	5.079.200
302	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8	4.595.150
303	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8	4.595.150
304	KEPALA LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA KELAS I	12	9.896.000
305	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	5.079.200
306	KEPALA SEKSI REGISTRASI, PERAWATAN DAN PELAYANAN	9	5.079.200
307	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN	9	5.079.200
308	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI DAN KLASIFIKASI	8	4.595.150
309	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN	8	4.595.150
310	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN	8	4.595.150
311	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN	8	4.595.150
312	KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I	12	9.896.000
313	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	5.079.200
314	KEPALA SEKSI REGISTRASI DAN KLASIFIKASI	9	5.079.200
315	KEPALA SEKSI PEMBINAAN	9	5.079.200
316	KEPALA SEKSI PERAWATAN	9	5.079.200
317	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN	9	5.079.200
318	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN TATA USAHA	8	4.595.150
319	KEPALA URUSAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	8	4.595.150
320	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8	4.595.150
321	KEPALA SUBSEKSI PENILAIAN DAN PENGKLASIFIKASIAN	8	4.595.150
322	KEPALA SUBSEKSI PENDIDIKAN DAN LATIHAN KETERAMPILAN	8	4.595.150
323	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PENGENTASAN	8	4.595.150
324	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN MAKANAN, MINUMAN DAN PERLENGKAPAN NARAPIDANA	8	4.595.150
325	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN KESEHATAN	8	4.595.150
326	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN	8	4.595.150

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
327	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA	12	9.896.000
328	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
329	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK	9	5.079.200
330	KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA	9	5.079.200
331	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	9	5.079.200
332	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9	5.079.200
333	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8	4.595.150
334	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
335	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8	4.595.150
336	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PERAWATAN	8	4.595.150
337	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA DAN PENGELOLAAN HASIL KERJA	8	4.595.150
338	KEPALA SUBSEKSI SARANA KERJA	8	4.595.150
339	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8	4.595.150
340	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8	4.595.150
341	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB	12	9.896.000
342	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9	5.079.200
343	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
344	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8	4.595.150
345	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
346	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA	9	5.079.200
347	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	9	5.079.200
348	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI DAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8	4.595.150
349	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK	8	4.595.150
350	KEPALA SUBSEKSI KEGIATAN KERJA	8	4.595.150
351	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8	4.595.150
352	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8	4.595.150
353	KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II	12	9.896.000
354	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	5.079.200
355	KEPALA SEKSI REGISTRASI DAN KLASIFIKASI	9	5.079.200
356	KEPALA SEKSI PEMBINAAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
357	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN	9	5.079.200
358	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN TATA USAHA	8	4.595.150
359	KEPALA URUSAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	8	4.595.150
360	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8	4.595.150
361	KEPALA SUBSEKSI PENILAIAN DAN PENGKLASIFIKASIAN	8	4.595.150
362	KEPALA SUBSEKSI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8	4.595.150
363	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN	8	4.595.150
364	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN	8	4.595.150
365	KEPALA LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA KELAS II	10	5.979.200
366	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
367	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI DAN KLASIFIKASI	8	4.595.150
368	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN DAN PELAYANAN	8	4.595.150
369	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN	8	4.595.150
370	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB	12	9.896.000
371	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9	5.079.200
372	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
373	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8	4.595.150
374	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
375	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA	9	5.079.200
376	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI DAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8	4.595.150
377	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK	8	4.595.150
378	KEPALA SUBSEKSI KEGIATAN KERJA	8	4.595.150
379	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	9	5.079.200
380	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8	4.595.150
381	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8	4.595.150
382	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TERBUKA	12	9.896.000
383	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9	5.079.200
384	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
385	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8	4.595.150
386	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
387	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA / ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA	9	5.079.200
388	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI DAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8	4.595.150
389	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN NARAPIDANA/ ANAK DIDIK	8	4.595.150
390	KEPALA SUBSEKSI KEGIATAN KERJA	8	4.595.150
391	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	9	5.079.200
392	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8	4.595.150
393	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8	4.595.150
394	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS III	10	5.979.200
395	KEPALA URUSAN TATA USAHA	8	4.595.150
396	KEPALA SUBSEKSI ADMISI DAN ORIENTASI	8	4.595.150
397	KEPALA SUBSEKSI PEMBINAAN	8	4.595.150
398	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	8	4.595.150
399	KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I	12	9.896.000
400	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUMAH TAHANAN NEGARA	9	5.079.200
401	KEPALA URUSAN TATA USAHA	8	4.595.150
402	KEPALA SEKSI PELAYANAN TAHANAN	9	5.079.200
403	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI DAN PERAWATAN	8	4.595.150
404	KEPALA SUBSEKSI BANTUAN HUKUM DAN PENYULUHAN	8	4.595.150
405	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEGIATAN	8	4.595.150
406	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN RUMAH TAHANAN NEGARA	9	5.079.200
407	KEPALA SUBSEKSI KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	8	4.595.150
408	KEPALA SUBSEKSI UMUM	8	4.595.150
409	KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA	10	5.979.200
410	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUMAH TAHANAN NEGARA	8	4.595.150
411	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN	8	4.595.150
412	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEGIATAN	8	4.595.150
413	KEPALA SUBSEKSI PENGELOLAAN RUMAH TAHANAN NEGARA	8	4.595.150
414	KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA	10	5.979.200
415	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN	8	4.595.150
416	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEGIATAN	8	4.595.150

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
417	KEPALA SUBSEKSI PENGELOLAAN RUMAH TAHANAN NEGARA	8	4.595.150
418	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUMAH TAHANAN NEGARA	8	4.595.150
419	KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB	10	5.979.200
420	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUMAH TAHANAN NEGARA	8	4.595.150
421	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN	8	4.595.150
422	KEPALA SUBSEKSI PENGELOLAAN RUMAH TAHANAN NEGARA	8	4.595.150
423	KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I	12	9.896.000
424	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
425	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8	4.595.150
426	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8	4.595.150
427	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
428	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA	9	5.079.200
429	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8	4.595.150
430	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8	4.595.150
431	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA	8	4.595.150
432	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN ANAK	9	5.079.200
433	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8	4.595.150
434	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8	4.595.150
435	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA	8	4.595.150
436	KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II	10	5.979.200
437	KEPALA URUSAN TATA USAHA	8	4.595.150
438	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA	8	4.595.150
439	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN ANAK	8	4.595.150
440	KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KLAS I	10	5.979.200
441	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI DAN PEMELIHARAAN	8	4.595.150
442	KEPALA SUBSEKSI PENGAMANAN DAN PENGELOLAAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA	8	4.595.150
443	KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II	10	5.979.200
444	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA	8	4.595.150
445	KEPALA BALAI HARTA PENINGGALAN	12	9.896.000
446	KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH I	9	5.079.200
447	KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH II	9	5.079.200
448	KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	WILAYAH III		
449	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
450	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI	14	17.064.000
451	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	11	8.757.600
452	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	9	5.079.200
453	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9	5.079.200
454	KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	11	8.757.600
455	KEPALA SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
456	KEPALA SEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
457	KEPALA BIDANG DOKUMEN PERJALANAN DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	11	8.757.600
458	KEPALA SEKSI DOKUMEN PERJALANAN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
459	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
460	KEPALA BIDANG INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	11	8.757.600
461	KEPALA SEKSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
462	KEPALA SEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
463	KEPALA BIDANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	11	8.757.600
464	KEPALA SEKSI PEMERIKSAAN I	10	5.979.200
465	KEPALA SEKSI PEMERIKSAAN II	10	5.979.200
466	KEPALA SEKSI PEMERIKSAAN III	10	5.979.200
467	KEPALA SEKSI PEMERIKSAAN IV	10	5.979.200
468	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI	14	17.064.000
469	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	11	8.757.600
470	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	9	5.079.200
471	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9	5.079.200
472	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN PERJALANAN	11	8.757.600
473	KEPALA SEKSI PELAYANAN DOKUMEN PERJALANAN	9	5.079.200
474	KEPALA SEKSI VERIFIKASI DAN ADJUDIKASI DOKUMEN PERJALANAN	9	5.079.200
475	KEPALA BIDANG IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN	11	8.757.600
476	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
477	KEPALA SEKSI STATUS KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
478	KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	11	8.757.600
479	KEPALA SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	KEIMIGRASIAN		
480	KEPALA SEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
481	KEPALA BIDANG INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	11	8.757.600
482	KEPALA SEKSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
483	KEPALA SEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
484	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI	12	9.896.000
485	KEPALA SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
486	KEPALA SUBSEKSI TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
487	KEPALA SUBSEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
488	KEPALA SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
489	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN DOKUMEN PERJALANAN	8	4.595.150
490	KEPALA SUBSEKSI PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
491	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
492	KEPALA SUBSEKSI IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
493	KEPALA SUBSEKSI STATUS KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
494	KEPALA SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
495	KEPALA SUBSEKSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
496	KEPALA SUBSEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
497	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
498	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8	4.595.150
499	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8	4.595.150
500	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
501	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI	12	9.896.000
502	KEPALA SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
503	KEPALA SUBSEKSI TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
504	KEPALA SUBSEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
505	KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN PERJALANAN	9	5.079.200
506	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN DOKUMEN PERJALANAN	8	4.595.150
507	KEPALA SUBSEKSI VERIFIKASI DAN ADJUDIKASI DOKUMEN PERJALANAN	8	4.595.150
508	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
509	KEPALA SUBSEKSI IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
510	KEPALA SUBSEKSI STATUS KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
511	KEPALA SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
512	KEPALA SUBSEKSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
513	KEPALA SUBSEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
514	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
515	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8	4.595.150
516	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8	4.595.150
517	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
518	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI	11	8.757.600
519	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
520	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8	4.595.150
521	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8	4.595.150
522	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
523	KEPALA SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
524	KEPALA SUBSEKSI TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
525	KEPALA SUBSEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
526	KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
527	KEPALA SUBSEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
528	KEPALA SUBSEKSI IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
529	KEPALA SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
530	KEPALA SUBSEKSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
531	KEPALA SUBSEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
532	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI	11	8.757.600
533	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
534	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8	4.595.150
535	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8	4.595.150
536	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
537	KEPALA SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
538	KEPALA SUBSEKSI TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
539	KEPALA SUBSEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
540	KEPALA SEKSI DOKUMEN DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
541	KEPALA SUBSEKSI DOKUMEN PERJALANAN	8	4.595.150
542	KEPALA SUBSEKSI IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
543	KEPALA SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
544	KEPALA SUBSEKSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
545	KEPALA SUBSEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
546	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS III TPI	10	5.979.200
547	KEPALA URUSAN TATA USAHA	8	4.595.150
548	KEPALA SUBSEKSI LALU LINTAS DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
549	KEPALA SUBSEKSI TEKNOLOGI INFORMASI, INTELIJEN, DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
550	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI	10	5.979.200
551	KEPALA URUSAN TATA USAHA	8	4.595.150
552	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
553	KEPALA SUBSEKSI TEKNOLOGI INFORMASI, INTELIJEN, DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
554	KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT	14	17.064.000
555	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	11	8.757.600
556	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	5.079.200
557	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN	9	5.079.200
558	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9	5.079.200
559	KEPALA BIDANG REGISTRASI DAN PERAWATAN	11	8.757.600
560	KEPALA SEKSI REGISTRASI, ADMINISTRASI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
561	KEPALA SEKSI PERAWATAN	9	5.079.200
562	KEPALA SEKSI KESEHATAN	9	5.079.200
563	KEPALA BIDANG PENEMPATAN, KEAMANAN, PEMULANGAN DAN DEPORTASI	11	8.757.600
564	KEPALA SEKSI KEAMANAN	10	5.979.200
565	KEPALA SEKSI PENEMPATAN	9	5.079.200
566	KEPALA SEKSI PEMULANGAN DAN DEPORTASI	9	5.079.200
567	KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI	12	9.896.000
568	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
569	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8	4.595.150
570	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8	4.595.150
571	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
572	KEPALA SEKSI REGISTRASI, ADMINISTRASI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
573	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8	4.595.150
574	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI DAN PELAPORAN	8	4.595.150

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
575	KEPALA SEKSI PERAWATAN DAN KESEHATAN	9	5.079.200
576	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN	8	4.595.150
577	KEPALA SUBSEKSI KESEHATAN	8	4.595.150
578	KEPALA SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	10	5.979.200
579	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	9	5.079.200
580	KEPALA SUBSEKSI KETERTIBAN	9	5.079.200
581	KEPALA RUMAH SAKIT	12	9.896.000
582	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	9	5.079.200
583	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	9	5.079.200
584	KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	13	10.936.000
585	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
586	KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN	9	5.079.200
587	KEPALA SEKSI PROGRAM DAN EVALUASI	9	5.079.200

D. DAFTAR NAMA JABATAN, KELAS JABATAN, DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI		
	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	10	5.979.200
	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	12	9.896.000
	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI UTAMA	14	17.064.000
2	PEMERIKSA PATEN AHLI		
	PEMERIKSA PATEN AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PEMERIKSA PATEN AHLI MUDA	9	5.079.200
	PEMERIKSA PATEN AHLI MADYA	11	8.757.600
	PEMERIKSA PATEN AHLI UTAMA	13	10.936.000
3	PEMERIKSA MEREK AHLI		
	PEMERIKSA MEREK AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PEMERIKSA MEREK AHLI MUDA	9	5.079.200
	PEMERIKSA MEREK AHLI MADYA	11	8.757.600
	PEMERIKSA MEREK AHLI UTAMA	13	10.936.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
4	PEMERIKSA MEREK TERAMPIL		
	PEMERIKSA MEREK PELAKSANA	6	3.510.400
	PEMERIKSA MEREK PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	PEMERIKSA MEREK PENYELIA	8	4.595.150
5	DOKTER/SPESIALIS		
	DOKTER PERTAMA	8	4.595.150
	DOKTER MUDA	9	5.079.200
	DOKTER MADYA	11	8.757.600
	DOKTER UTAMA	13	10.936.000
6	DOKTER GIGI/SPESIALIS		
	DOKTER GIGI PERTAMA	8	4.595.150
	DOKTER GIGI MUDA	9	5.079.200
	DOKTER GIGI MADYA	11	8.757.600
	DOKTER GIGI UTAMA	13	10.936.000
7	PERAWAT GIGI		
	PERAWAT GIGI PELAKSANA	6	3.510.400
	PERAWAT GIGI PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	PERAWAT GIGI PENYELIA	8	4.595.150
8	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL		
	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	6	3.510.400
	TERAPIS GIGI DAN MULUT MAHIR	7	3.915.950
	TERAPIS GIGI DAN MULUT PENYELIA	8	4.595.150
9	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI		
	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI MUDA	9	5.079.200
	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI MADYA	11	8.757.600
10	PERAWAT AHLI		
	PERAWAT AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PERAWAT AHLI MUDA	9	5.079.200
	PERAWAT AHLI MADYA	11	8.757.600
	PERAWAT AHLI UTAMA	13	10.936.000
11	PERAWAT TERAMPIL		
	PERAWAT TERAMPIL	6	3.510.400
	PERAWAT MAHIR	7	3.915.950

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PERAWAT PENYELIA	8	4.595.150
12	ARSIPARIS AHLI		
	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	ARSIPARIS AHLI MUDA	9	5.079.200
	ARSIPARIS AHLI MADYA	11	8.757.600
	ARSIPARIS AHLI UTAMA	13	10.936.000
13	ARSIPARIS TERAMPIL		
	ARSIPARIS PELAKSANA	6	3.510.400
	ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	ARSIPARIS PENYELIA	8	4.595.150
14	PUSTAKAWAN AHLI		
	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PUSTAKAWAN AHLI MUDA	9	5.079.200
	PUSTAKAWAN AHLI MADYA	11	8.757.600
	PUSTAKAWAN AHLI UTAMA	13	10.936.000
15	PUSTAKAWAN TERAMPIL		
	PUSTAKAWAN PELAKSANA	6	3.510.400
	PUSTAKAWAN PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	PUSTAKAWAN PENYELIA	8	4.595.150
16	WIDYAIKWARA AHLI		
	WIDYAIKWARA AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	WIDYAIKWARA AHLI MUDA	10	5.979.200
	WIDYAIKWARA AHLI MADYA	12	9.896.000
	WIDYAIKWARA AHLI UTAMA	14	17.064.000
17	PENELITI AHLI		
	PENELITI AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PENELITI AHLI MUDA	9	5.079.200
	PENELITI AHLI MADYA	11	8.757.600
	PENELITI AHLI UTAMA	13	10.936.000
18	AUDITOR AHLI		
	AUDITOR AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	AUDITOR AHLI MUDA	10	5.979.200
	AUDITOR AHLI MADYA	12	9.896.000
	AUDITOR AHLI UTAMA	14	17.064.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
19	AUDITOR TERAMPIL		
	AUDITOR PELAKSANA	6	3.510.400
	AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	AUDITOR PENYELIA	9	5.079.200
20	PRANATA KOMPUTER AHLI		
	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA	9	5.079.200
	PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA	11	8.757.600
	PRANATA KOMPUTER AHLI UTAMA	13	10.936.000
21	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL		
	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA	6	3.510.400
	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	PRANATA KOMPUTER PENYELIA	8	4.595.150
22	ANALIS KEPEGAWAIAN TERAMPIL		
	ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA	6	3.510.400
	ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	ANALIS KEPEGAWAIAN PENYELIA	8	4.595.150
23	PRANATA SDM APARATUR TERAMPIL		
	PRANATA SDM APARATUR TERAMPIL	6	3.510.400
	PRANATA SDM APARATUR MAHIR	7	3.915.950
	PRANATA SDM APARATUR PENYELIA	8	4.595.150
24	ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI		
	ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MUDA	9	5.079.200
	ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MADYA	11	8.757.600
	ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI UTAMA	13	10.936.000
25	ANALIS SDM APARATUR AHLI		
	ANALIS SDM APARATUR AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA	10	5.979.200
	ANALIS SDM APARATUR AHLI MADYA	12	9.896.000
	ANALIS SDM APARATUR AHLI UTAMA	14	17.064.000
26	PSIKOLOG KLINIS AHLI		
	PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA	8	4.595.150

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PSIKOLOG KLINIS AHLI MUDA	9	5.079.200
	PSIKOLOG KLINIS AHLI MADYA	11	8.757.600
27	PENERJEMAH AHLI		
	PENERJEMAH AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PENERJEMAH AHLI MUDA	9	5.079.200
	PENERJEMAH AHLI MADYA	11	8.757.600
	PENERJEMAH AHLI UTAMA	13	10.936.000
28	APOTEKER AHLI		
	APOTEKER AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	APOTEKER AHLI MUDA	9	5.079.200
	APOTEKER AHLI MADYA	11	8.757.600
	APOTEKER AHLI UTAMA	13	10.936.000
29	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL		
	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA PEMULA	5	3.134.250
	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA	6	3.510.400
	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	ASISTEN APOTEKER PENYELIA	8	4.595.150
30	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI		
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MUDA	9	5.079.200
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MADYA	11	8.757.600
31	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL		
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA PEMULA	5	3.134.250
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA	6	3.510.400
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN LANJUTAN	7	3.915.950
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA	8	4.595.150
32	FISIOTERAPIS AHLI		
	FISIOTERAPIS AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	FISIOTERAPIS AHLI MUDA	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	FISIOTERAPIS AHLI MADYA	11	8.757.600
33	FISIOTERAPIS TERAMPIL		
	FISIOTERAPIS PELAKSANA	6	3.510.400
	FISIOTERAPIS PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	FISIOTERAPIS PENYELIA	8	4.595.150
34	RADIOGRAFER TERAMPIL		
	RADIOGRAFER PELAKSANA	6	3.510.400
	RADIOGRAFER PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	RADIOGRAFER PENYELIA	8	4.595.150
35	PEREKAM MEDIS		
	PEREKAM MEDIS PELAKSANA	6	3.510.400
	PEREKAM MEDIS PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	PEREKAM MEDIS PENYELIA	8	4.595.150
36	NUTRISIONIS AHLI		
	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	NUTRISIONIS AHLI MUDA	9	5.079.200
	NUTRISIONIS AHLI MADYA	11	8.757.600
37	NUTRISIONIS TERAMPIL		
	NUTRISIONIS PELAKSANA	6	3.510.400
	NUTRISIONIS PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	NUTRISIONIS PENYELIA	8	4.595.150
38	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI		
	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA	9	5.079.200
	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MADYA	11	8.757.600
39	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI AHLI		
	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI PERTAMA	8	4.595.150
	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI MUDA	9	5.079.200
	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI MADYA	11	8.757.600
	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI UTAMA	13	10.936.000
40	BIDAN AHLI		
	BIDAN AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	BIDAN AHLI MUDA	9	5.079.200
	BIDAN AHLI MADYA	11	8.757.600

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	BIDAN AHLI UTAMA	13	10.936.000
41	BIDAN TERAMPIL		
	BIDAN PELAKSANA/TERAMPIL	6	3.510.400
	BIDAN PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7	3.915.950
	BIDAN PENYELIA	8	4.595.150
42	PENYULUH HUKUM AHLI		
	PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PENYULUH HUKUM AHLI MUDA	9	5.079.200
	PENYULUH HUKUM AHLI MADYA	11	8.757.600
	PENYULUH HUKUM AHLI UTAMA	13	10.936.000
43	ANALIS KEIMIGRASIAN AHLI		
	ANALIS KEIMIGRASIAN AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	ANALIS KEIMIGRASIAN AHLI MUDA	9	5.079.200
	ANALIS KEIMIGRASIAN AHLI MADYA	11	8.757.600
	ANALIS KEIMIGRASIAN AHLI UTAMA	13	10.936.000
44	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN TERAMPIL		
	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PEMULA	5	3.134.250
	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PELAKSANA	6	3.510.400
	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7	3.915.950
	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PENYELIA	8	4.595.150
45	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN AHLI		
	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN AHLI MUDA	9	5.079.200
	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN AHLI MADYA	11	8.757.600
	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN AHLI UTAMA	13	10.936.000
46	ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN		
	ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PELAKSANA/TERAMPIL	6	3.510.400
	ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7	3.915.950
	ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PENYELIA	8	4.595.150

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
47	DOSEN		
	ASISTEN AHLI	9	5.079.200
	LEKTOR	11	8.757.600
	LEKTOR KEPALA	13	10.936.000
	PROFESOR	15	19.280.000
48	PERENCANA AHLI		
	PERENCANA AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PERENCANA AHLI MUDA	10	5.979.200
	PERENCANA AHLI MADYA	12	9.896.000
49	ANALIS KEBIJAKAN AHLI		
	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	9	5.079.200
	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA	11	8.757.600
	ANALIS KEBIJAKAN AHLI UTAMA	13	10.936.000
50	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI		
	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA	10	5.979.200
	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MADYA	12	9.896.000
51	AUDITOR KEPEGAWAIAN AHLI		
	AUDITOR KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	AUDITOR KEPEGAWAIAN AHLI MUDA	9	5.079.200
	AUDITOR KEPEGAWAIAN AHLI MADYA	11	8.757.600
52	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI		
	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA	10	5.979.200
	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA	12	9.896.000
	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI UTAMA	14	17.064.000
53	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT		

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	TERAMPIL		
	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PELAKSANA	6	3.510.400
	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PENYELIA	8	4.595.150
54	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI		
	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA	9	5.079.200
	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MADYA	11	8.757.600
55	ANALIS ANGGARAN AHLI		
	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA	10	5.979.200
	ANALIS ANGGARAN AHLI MADYA	12	9.896.000
56	ANALIS INTELIJEN AHLI		
	ANALIS INTELIJEN AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	ANALIS INTELIJEN AHLI MUDA	9	5.079.200
57	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT TERAMPIL		
	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PELAKSANA	6	3.510.400
	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT LANJUTAN	7	3.915.950
	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PENYELIA	8	4.595.150
58	ANALIS HUKUM AHLI		
	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	ANALIS HUKUM AHLI MUDA	9	5.079.200
	ANALIS HUKUM AHLI MADYA	11	8.757.600
	ANALIS HUKUM AHLI UTAMA	13	10.936.000
59	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI		
	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MUDA	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MADYA	11	8.757.600
	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI UTAMA	13	10.936.000
60	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI		
	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI MUDA	10	5.979.200
	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI MADYA	12	9.896.000
61	KURATOR KEPERDATAAN AHLI		
	KURATOR KEPERDATAAN AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	KURATOR KEPERDATAAN AHLI MUDA	9	5.079.200
	KURATOR KEPERDATAAN AHLI MADYA	11	8.757.600
	KURATOR KEPERDATAAN AHLI UTAMA	13	10.936.000
62	PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN AHLI		
	PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN AHLI MUDA	9	5.079.200
	PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN AHLI MADYA	11	8.757.600
	PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN AHLI UTAMA	13	10.936.000
63	PENGAMAN PEMASYARAKATAN PEMULA	5	3.134.250
	PENGAMAN PEMASYARAKATAN TERAMPIL	6	3.510.400
	PENGAMAN PEMASYARAKATAN MAHIR	7	3.915.950
	PENGAMAN PEMASYARAKATAN PENYELIA	8	4.595.150
64	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU TERAMPIL		
	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU TERAMPIL	6	3.510.400
	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU MAHIR	7	3.915.950
	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU PENYELIA	8	4.595.150
65	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI		

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI MUDA	9	5.079.200
	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI MADYA	11	8.757.600
	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI UTAMA	13	10.936.000
66	PENATA PENERBITAN ILMIAH AHLI		
	PENATA PENERBITAN ILMIAH AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PENATA PENERBITAN ILMIAH AHLI MUDA	9	5.079.200
	PENATA PENERBITAN ILMIAH AHLI MADYA	11	8.757.600
67	ANALIS DATA ILMIAH AHLI		
	ANALIS DATA ILMIAH AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	ANALIS DATA ILMIAH AHLI MUDA	9	5.079.200
	ANALIS DATA ILMIAH AHLI MADYA	11	8.757.600
	ANALIS DATA ILMIAH AHLI UTAMA	13	10.936.000
68	PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TERAMPIL		
	PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TERAMPIL	7	3.915.950
	PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA MAHIR	8	4.595.150
	PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PENYELIA	9	5.079.200
69	PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN TERAMPIL		
	PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN TERAMPIL	6	3.510.400
	PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN MAHIR	7	3.915.950
	PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN PENYELIA	8	4.595.150
70	PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN AHLI		
	PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	AHLI MUDA		
	PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN AHLI MADYA	11	8.757.600
71	TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI		
	TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI MUDA	9	5.079.200
	TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI MADYA	11	8.757.600
72	ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL AHLI		
	ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL PERTAMA	8	4.595.150
	ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL MUDA	9	5.079.200
	ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL MADYA	11	8.757.600
	ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL UTAMA	13	10.936.000
73	PENATA MEDIASI SENGKETA HAK ASASI MANUSIA AHLI		
	PENATA MEDIASI SENGKETA HAK ASASI MANUSIA PERTAMA	8	4.595.150
	PENATA MEDIASI SENGKETA HAK ASASI MANUSIA MUDA	9	5.079.200
	PENATA MEDIASI SENGKETA HAK ASASI MANUSIA MADYA	11	8.757.600

E. DAFTAR NAMA JABATAN, KELAS JABATAN, DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN LAINNYA

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
STAF AHLI DAN STAF KHUSUS MENTERI			
1	STAF AHLI BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	16	27.577.500
2	STAF AHLI BIDANG EKONOMI	16	27.577.500
3	STAF AHLI BIDANG SOSIAL	16	27.577.500
4	STAF AHLI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	16	27.577.500
5	STAF AHLI BIDANG PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI	16	27.577.500
6	STAF KHUSUS MENTERI	16	27.577.500
PELAKSANA			
1	BENDAHARA PENGELUARAN PUSAT	8	4.595.150

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
2	BENDAHARA PENERIMAAN PUSAT	8	4.595.150
3	ANALIS DATA INTELLJEN	7	3.915.950
4	ANALIS EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7	3.915.950
5	ANALIS JABATAN	7	3.915.950
6	ANALIS HUKUM	7	3.915.950
7	ANALIS KEBUTUHAN DAN MANFAAT PELATIHAN	7	3.915.950
8	ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL	7	3.915.950
9	ANALIS KELEMBAGAAN	7	3.915.950
10	ANALIS KONSEPSI, PRAKARSA DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7	3.915.950
11	ANALIS KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN	7	3.915.950
12	ANALIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN	7	3.915.950
13	ANALIS PELINDUNGAN HAK-HAK SIPIL DAN HAK ASASI MANUSIA	7	3.915.950
14	ANALIS PENDAPAT HUKUM DAN ADVOKASI	7	3.915.950
15	ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT	7	3.915.950
16	ANALIS PENGEMBANGAN HUKUM	7	3.915.950
17	ANALIS PENGEMBANGAN PEGAWAI	7	3.915.950
18	ANALIS PENYELESAIAN PEWARGANEGARAAN	7	3.915.950
19	ANALIS PERATURAN DAERAH	7	3.915.950
20	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	3.915.950
21	ANALIS PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA	7	3.915.950
22	ANALIS PERJANJIAN KERJA SAMA	7	3.915.950
23	ANALIS PERMASALAHAN HAM	7	3.915.950
24	ANALIS PERMASALAHAN HUKUM	7	3.915.950
25	ANALIS PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI	7	3.915.950
26	ANALIS PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	7	3.915.950
27	ANALIS PERMOHONAN PENDAPAT HUKUM	7	3.915.950
28	ANALIS PERTIMBANGAN BANTUAN HUKUM	7	3.915.950
29	ANALIS PERTIMBANGAN EKSTRADISI	7	3.915.950
30	ANALIS PERTIMBANGAN HUKUM	7	3.915.950
31	ANALIS PROGRAM BIMBINGAN	7	3.915.950
32	ANALIS RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7	3.915.950
33	ANALIS SIDIK JARI	7	3.915.950
34	ANALIS SISTEM APLIKASI DAN JARINGAN KOMPUTER	7	3.915.950
35	ANALIS SISTEM PROSEDUR DAN METODE KERJA	7	3.915.950

36	ANALIS STANDARDISASI SARANA KERJA	7	3.915.950
37	BENDAHARA PENERIMAAN SATUAN KERJA	7	3.915.950
38	BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA	7	3.915.950
39	KUSTODIAN BARANG MILIK NEGARA	7	3.915.950
40	NAHKODA	7	3.915.950
41	PENATA KEUANGAN	7	3.915.950
42	PENELAAH DOKUMEN FISIK PERSEROAN	7	3.915.950
43	PENELAAH KEIMIGRASIAN	7	3.915.950
44	PENELAAH RANCANGAN PERJANJIAN EKSTRADISI	7	3.915.950
45	PENELAAH STATUS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN	7	3.915.950
46	PENERJEMAH BAHAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7	3.915.950
47	PENGEVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN	7	3.915.950
48	PENYULUH HAK ASASI MANUSIA	7	3.915.950
49	PENYUSUN ABSTRAKSI HUKUM	7	3.915.950
50	PENYUSUN BAHAN KERJA SAMA	7	3.915.950
51	PENYUSUN INFORMASI HUKUM	7	3.915.950
52	PENYUSUN KONSEP KETERANGAN PEMERINTAH	7	3.915.950
53	PENYUSUN LAPORAN DAN HASIL EVALUASI	7	3.915.950
54	PENYUSUN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	7	3.915.950
55	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	7	3.915.950
56	PENYUSUN LAPORAN PENGAWASAN	7	3.915.950
57	PENYUSUN MATERI BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH	7	3.915.950
58	PENYUSUN MATERI KEBIJAKAN	7	3.915.950
59	PENYUSUN MATERI PENGHARMONISASIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7	3.915.950
60	PENYUSUN NASKAH AKADEMIK	7	3.915.950
61	PENYUSUN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	7	3.915.950
62	PENYUSUN PROGRAM	7	3.915.950
63	PENYUSUN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	7	3.915.950
64	PENYUSUN TINDAK LANJUT DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	7	3.915.950
65	ANALIS ASET NEGARA	7	3.915.950
66	ANALIS BARANG MILIK NEGARA	7	3.915.950
67	ANALIS BERKAS SENGKETA	7	3.915.950
68	ANALIS DATA AKADEMIK	7	3.915.950
69	ANALIS DATA DAN INFORMASI	7	3.915.950
70	ANALIS DATA STANDARISASI	7	3.915.950
71	ANALIS DIKLAT	7	3.915.950
72	ANALIS FORENSIK DIGITAL	7	3.915.950

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
73	ANALIS GIZI	7	3.915.950
74	ANALIS HASIL PENGAWASAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT	7	3.915.950
75	ANALIS HUBUNGAN ANTARLEMBAGA	7	3.915.950
76	ANALIS HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	7	3.915.950
77	ANALIS INFORMASI	7	3.915.950
78	ANALIS INFORMASI PENDIDIKAN	7	3.915.950
79	ANALIS INTELLJEN	7	3.915.950
80	ANALIS KEAMANAN	7	3.915.950
81	ANALIS PENILAIAN	7	3.915.950
82	ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL	7	3.915.950
83	ANALIS KERJA SAMA	7	3.915.950
84	ANALIS KERJASAMA LUAR NEGERI	7	3.915.950
85	ANALIS KESEHATAN	7	3.915.950
86	ANALIS KINERJA	7	3.915.950
87	ANALIS KOMERSIALISASI HKI	7	3.915.950
88	ANALIS KOMPETENSI	7	3.915.950
89	ANALIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	7	3.915.950
90	ANALIS MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	3.915.950
91	ANALIS MUTASI PEJABAT NEGARA	7	3.915.950
92	ANALIS MUTU AKADEMIK	7	3.915.950
93	ANALIS PARTAI POLITIK	7	3.915.950
94	ANALIS PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN	7	3.915.950
95	ANALIS PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN TENAGA TEKNIS DAN FUNGSIONAL NON PENDIDIK	7	3.915.950
96	ANALIS PELAPORAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN	7	3.915.950
97	ANALIS PELAYANAN	7	3.915.950
98	ANALIS PEMASYARAKATAN	7	3.915.950
99	ANALIS PENATAAN JARINGAN	7	3.915.950
100	ANALIS PENEGAKAN INTEGRITAS DAN DISIPLIN SDM APARATUR	7	3.915.950
101	ANALIS PENERAPAN APLIKASI DAN KONTEN	7	3.915.950
102	ANALIS PENGAMANAN LINGKUNGAN	7	3.915.950
103	ANALIS PENGEMBANGAN KARIR	7	3.915.950
104	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI	7	3.915.950
105	ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR	7	3.915.950
106	ANALIS PENINDAKAN	7	3.915.950
107	ANALIS PENYAKIT MENULAR	7	3.915.950
108	ANALIS PENYIDIKAN	7	3.915.950

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
109	ANALIS PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI	7	3.915.950
110	ANALIS PERATURAN ADMINISTRASI	7	3.915.950
111	ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7	3.915.950
112	ANALIS PERBENDAHARAAN	7	3.915.950
113	ANALIS PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	7	3.915.950
114	ANALIS PERENCANAAN	7	3.915.950
115	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN	7	3.915.950
116	ANALIS PERENCANAAN DAN KERJASAMA	7	3.915.950
117	ANALIS PERENCANAAN SDM APARATUR	7	3.915.950
118	ANALIS PERENCANAAN STRATEGIS	7	3.915.950
119	ANALIS PRODUK HUKUM	7	3.915.950
120	ANALIS PROGRAM DIKLAT	7	3.915.950
121	ANALIS PUBLIKASI	7	3.915.950
122	ANALIS REKENING PEMERINTAH	7	3.915.950
123	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	3.915.950
124	ANALIS RESOSIALISASI DAN REHABILITASI	7	3.915.950
125	ANALIS SATUAN PENGAWAS INTERNAL	7	3.915.950
126	ANALIS SISTEM AKUNTANSI PUSAT	7	3.915.950
127	ANALIS SISTEM INFORMASI	7	3.915.950
128	ANALIS SISTEM INFOMASI DAN DISEMINASI HUKUM	7	3.915.950
129	ANALIS SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN	7	3.915.950
130	ANALIS STANDAR MUTU BAHAN DAN PERALATAN	7	3.915.950
131	ANALIS STANDAR TEKNOLOGI INFORMASI	7	3.915.950
132	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	7	3.915.950
133	ANALIS TATA USAHA	7	3.915.950
134	BENDAHARA	7	3.915.950
135	FASILITATOR PROMOSI	7	3.915.950
136	INVESTIGATOR	7	3.915.950
137	PEMERIKSA ANGGARAN	7	3.915.950
138	PEMBINA JASMANI DAN MENTAL	7	3.915.950
139	PEMERIKSA TEKNOLOGI INFORMASI	7	3.915.950
140	PENATA KENDARAAN DINAS	7	3.915.950
141	PENATA LAPORAN KEUANGAN	7	3.915.950
142	PENELAAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	7	3.915.950
143	PENGAWAS TEKNOLOGI INFORMASI	7	3.915.950
144	PENGENDALI TEKNOLOGI INFORMASI	7	3.915.950

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
145	PENGEVALUASI PROGRAM DAN KINERJA	7	3.915.950
146	PENYULUH KEARSIPAN	7	3.915.950
147	PENYULUH KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT	7	3.915.950
148	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	7	3.915.950
149	PENYUSUN BAHAN BANTUAN HUKUM	7	3.915.950
150	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	7	3.915.950
151	PENYUSUN BAHAN MATERI BIMBINGAN	7	3.915.950
152	PENYUSUN BAHAN PENYULUHAN HUKUM	7	3.915.950
153	PENYUSUN BAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SISTEM DAN METODA	7	3.915.950
154	PENYUSUN BERITA DAN PENDAPAT UMUM	7	3.915.950
155	PENYUSUN KURIKULUM, MODUL, DAN BAHAN AJAR	7	3.915.950
156	PENYUSUN LAPORAN HASIL DIKLAT	7	3.915.950
157	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	7	3.915.950
158	PENYUSUN PROGRAM KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA	7	3.915.950
159	PENYUSUN PROGRAM PENYELENGGARAAN DIKLAT	7	3.915.950
160	PENYUSUN RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	7	3.915.950
161	PENYUSUN RENCANA HASIL TELAAHAN USUL PENGHAPUSAN BARANG	7	3.915.950
162	PENYUSUN RENCANA HUKUM	7	3.915.950
163	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	7	3.915.950
164	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA	7	3.915.950
165	PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN	7	3.915.950
166	PENYUSUN RENCANA KEHUMASAN DAN PERPUSTAKAAN	7	3.915.950
167	PENYUSUN RENCANA KEUANGAN	7	3.915.950
168	PENYUSUN RENCANA KEUANGAN DAN BMN	7	3.915.950
169	PENYUSUN RENCANA MUTASI	7	3.915.950
170	PENYUSUN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN	7	3.915.950
171	PENYUSUN RENCANA PENGADAAN DAN SARANA PRASARANA	7	3.915.950
172	PENYUSUN STANDAR TEKNOLOGI INFORMASI	7	3.915.950
173	PENYUSUN TEKNIS PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI APARATUR DAN NON APARATUR	7	3.915.950
174	PERANCANG GRAFIS	7	3.915.950

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
175	PERANCANG KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	7	3.915.950
176	PERANCANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	7	3.915.950
177	PERANCANG SISTEM PEMASYARAKATAN ATAU REGISTRATOR	7	3.915.950
178	DOKUMENTALIS HUKUM	6	3.510.400
179	KOMANDAN JAGA PEMASYARAKATAN/KEIMIGRASIAN	6	3.510.400
180	PENGELOLA ARSIP KEPEGAWAIAN	6	3.510.400
181	PENGELOLA BANTUAN HUKUM	6	3.510.400
182	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	3.510.400
183	PENGELOLA BENDA SITAAN NEGARA/BARANG RAMPASAN NEGARA	6	3.510.400
184	PENGELOLA DATA	6	3.510.400
185	PENGELOLA DATA KEIMIGRASIAN	6	3.510.400
186	PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	6	3.510.400
187	PENGELOLA DATA PENGHARMONISASIAN	6	3.510.400
188	PENGELOLA HASIL KERJA	6	3.510.400
189	PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI	6	3.510.400
190	PENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	6	3.510.400
191	PENGELOLA KEUANGAN	6	3.510.400
192	PENGELOLA PEMBIMBINGAN KEMANDIRIAN	6	3.510.400
193	PENGELOLA PEMBINAAN BANTUAN	6	3.510.400
194	PENGELOLA PEMBINAAN INTELEKTUAL	6	3.510.400
195	PENGELOLA PEMBINAAN KEMANDIRIAN	6	3.510.400
196	PENGELOLA PEMBINAAN KEPRIBADIAN	6	3.510.400
197	PENGELOLA PEMBINAAN ROHANI	6	3.510.400
198	PENGELOLA PENERBITAN JURNAL LEGISLASI INDONESIA	6	3.510.400
199	PENGELOLA PENSIUN/PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	6	3.510.400
200	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	6	3.510.400
201	PENGELOLA PROGRAM GIZI	6	3.510.400
202	PENGELOLA RUMAH DETENSI	6	3.510.400
203	PENGELOLA SARANA KERJA	6	3.510.400
204	PENGELOLA SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN	6	3.510.400
205	PENGELOLA TATA NASKAH	6	3.510.400
206	PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI	6	3.510.400
207	PENGELOLA WEBSITE	6	3.510.400
208	PENGEVALUASI KEGIATAN PROGRAM	6	3.510.400
209	PENGOLAH APLIKASI SISTEM INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6	3.510.400

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
210	PENGOLAH BAHAN DISTRIBUSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6	3.510.400
211	PENGOLAH BAHAN EVALUASI DAN DOKUMENTASI EKSTRADISI	6	3.510.400
212	PENGOLAH BAHAN EVALUASI DAN PELAPORAN	6	3.510.400
213	PENGOLAH BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	6	3.510.400
214	PENGOLAH BAHAN PENGKAJIAN DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6	3.510.400
215	PENGOLAH BAHAN PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN	6	3.510.400
216	PENGOLAH DAN PENYUSUN BAHAN BIMBINGAN TEKNIS HAK ASASI MANUSIA	6	3.510.400
217	PENGOLAH DAN PENYUSUN DATA FASILITATOR BIMBINGAN TEKNIS HAK ASASI MANUSIA	6	3.510.400
218	PENGOLAH DAN PENYUSUN DATA PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT	6	3.510.400
219	PENGOLAH DAN PENYUSUN EVALUASI DAN PENGEMBANGAN BIMBINGAN TEKNIS	6	3.510.400
220	PENGOLAH DATA ADMINISTRASI KOMISI BANDING	6	3.510.400
221	PENGOLAH DATA ANGGARAN	6	3.510.400
222	PENGOLAH DATA APLIKASI DAN DATABASE	6	3.510.400
223	PENGOLAH DATA DAKTILOSKOPI	6	3.510.400
224	PENGOLAH DATA DAN BAHAN PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	6	3.510.400
225	PENGOLAH DATA DAN DOKUMENTASI HUKUM INTERNASIONAL UMUM	6	3.510.400
226	PENGOLAH DATA DISEMINASI HAK ASASI MANUSIA	6	3.510.400
227	PENGOLAH DATA EVALUASI DAN INFORMASI	6	3.510.400
228	PENGOLAH DATA HARTA PENINGGALAN	6	3.510.400
229	PENGOLAH DATA HASIL LAPORAN VERIFIKASI	6	3.510.400
230	PENGOLAH DATA HASIL PENELITIAN	6	3.510.400
231	PENGOLAH DATA HASIL PERTIMBANGAN DAN PENILAIAN PERLENGKAPAN	6	3.510.400
232	PENGOLAH DATA INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG	6	3.510.400
233	PENGOLAH DATA INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI	6	3.510.400
234	PENGOLAH DATA KEGIATAN ANTARBADAN INTERNASIONAL	6	3.510.400

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
235	PENGOLAH DATA KEGIATAN RENCANA, PROGRAM DAN ANGGARAN	6	3.510.400
236	PENGOLAH DATA KELEMBAGAAN	6	3.510.400
237	PENGOLAH DATA KERJASAMA	6	3.510.400
238	PENGOLAH DATA KESEHATAN	6	3.510.400
239	PENGOLAH DATA KLASIFIKASI DESAIN INDUSTRI	6	3.510.400
240	PENGOLAH DATA KLASIFIKASI KELAS BARANG	6	3.510.400
241	PENGOLAH DATA KOMPILASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MASALAH DAN KASUS	6	3.510.400
242	PENGOLAH DATA KOVENAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	6	3.510.400
243	PENGOLAH DATA KOVENAN HAK SIPIL DAN POLITIK	6	3.510.400
244	PENGOLAH DATA LAPORAN	6	3.510.400
245	PENGOLAH DATA LAPORAN ANALISA KEBUTUHAN DAN PEMBAKUAN PERLENGKAPAN	6	3.510.400
246	PENGOLAH DATA LAPORAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	6	3.510.400
247	PENGOLAH DATA LAPORAN HAK KELOMPOK RENTAN	6	3.510.400
248	PENGOLAH DATA LAPORAN HAK SIPIL DAN POLITIK	6	3.510.400
249	PENGOLAH DATA LAPORAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT	6	3.510.400
250	PENGOLAH DATA LAPORAN HASIL PENYALURAN PERLENGKAPAN	6	3.510.400
251	PENGOLAH DATA LAPORAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN	6	3.510.400
252	PENGOLAH DATA LAPORAN MATERI INFORMASI	6	3.510.400
253	PENGOLAH DATA LAPORAN METODOLOGI DISEMINASI HAK ASASI MANUSIA	6	3.510.400
254	PENGOLAH DATA LAPORAN PENILAIAN PERBENDAHARAAN	6	3.510.400
255	PENGOLAH DATA LAPORAN PRODUKSI DAN INFORMASI	6	3.510.400
256	PENGOLAH DATA LAPORAN SISTEM APLIKASI DAN DATABASE	6	3.510.400
257	PENGOLAH DATA PENGEMBANGAN JARINGAN BIMBINGAN TEKNIS HAK ASASI MANUSIA	6	3.510.400
258	PENGOLAH DATA PERENCANAAN DAN PROGRAM	6	3.510.400
259	PENGOLAH DATA WASIAT	6	3.510.400
260	PENGOLAH SAI	6	3.510.400

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
261	PENYUSUN BAHAN KOORDINASI DAN MONITORING PERSIDANGAN	6	3.510.400
262	PENYUSUN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA	6	3.510.400
263	PRANATA LAPORAN KEUANGAN	6	3.510.400
264	PRANATA PASUKAN PENGAMANAN DALAM	6	3.510.400
265	PRANATA SIDIK JARI	6	3.510.400
266	REGISTRATOR PEMASYARAKATAN	6	3.510.400
267	ROHANIAWAN AGAMA/PEMBIMBING AGAMA	6	3.510.400
268	SEKRETARIS PIMPINAN	6	3.510.400
269	TEKNISI JARINGAN	6	3.510.400
270	TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	6	3.510.400
271	VERIFIKATOR	6	3.510.400
272	PENATA LIPUTAN	6	3.510.400
273	VERIFIKATOR ANGGARAN	6	3.510.400
274	VERIFIKATOR BERKAS PERMOHONAN HAK	6	3.510.400
275	VERIFIKATOR DATA LAPORAN KEUANGAN	6	3.510.400
276	VERIFIKATOR KEUANGAN	6	3.510.400
277	AJUDAN	6	3.510.400
278	JURNALIS	6	3.510.400
279	PENGELOLA AKUNTANSI	6	3.510.400
280	PENGELOLA ANGGARAN	6	3.510.400
281	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	6	3.510.400
282	PENGELOLA BAHAN PUSTAKA	6	3.510.400
283	PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	6	3.510.400
284	PENGELOLA DATA LAPORAN DAN PENGADUAN	6	3.510.400
285	PENGELOLA DATA PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	6	3.510.400
286	PENGELOLA DATA PENCEGAHAN DAN MONTORING	6	3.510.400
287	PENGELOLA DATA PENYELENGGARAAN TES	6	3.510.400
288	PENGELOLA DATA PNBP	6	3.510.400
289	PENGELOLA DATA REKONSILIASI	6	3.510.400
290	PENGELOLA DATA TATA ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	6	3.510.400
291	PENGELOLA DATABASE	6	3.510.400
292	PENGELOLA DATABASE SURAT PERINTAH MEMBAYAR	6	3.510.400
293	PENGELOLA DISIPLIN PEGAWAI	6	3.510.400
294	PENGELOLA DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM	6	3.510.400

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
295	PENGELOLA DOKUMENTASI	6	3.510.400
296	PENGELOLA FASILITASI BANTUAN HUKUM	6	3.510.400
297	PENGELOLA GAJI	6	3.510.400
298	PENGELOLA GUDANG	6	3.510.400
299	PENGELOLA INFORMASI KERJA SAMA	6	3.510.400
300	PENGELOLA INFORMASI PRODUK HUKUM	6	3.510.400
301	PENGELOLA KEAMANAN SISTEM INFORMASI	6	3.510.400
302	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	3.510.400
303	PENGELOLA LAYANAN KEHUMASAN	6	3.510.400
304	PENGELOLA MEDIA CETAK	6	3.510.400
305	PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI	6	3.510.400
306	PENGELOLA PELAYANAN HUKUM	6	3.510.400
307	PENGELOLA PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN	6	3.510.400
308	PENGELOLA PENATAAN SARANA DAN PRASARANA	6	3.510.400
309	PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK	6	3.510.400
310	PENGELOLA PENGEMBANGAN KARIR	6	3.510.400
311	PENGELOLA PENGKAJIAN DAN PENELAAHAN HUKUM	6	3.510.400
312	PENGELOLA PENYELENGGARAAN DIKLAT	6	3.510.400
313	PENGELOLA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6	3.510.400
314	PENGELOLA PERJALANAN DINAS	6	3.510.400
315	PENGELOLA PERKARA	6	3.510.400
316	PENGELOLA PERPUSTAKAAN	6	3.510.400
317	PENGELOLA POLIKLINIK	6	3.510.400
318	PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN	6	3.510.400
319	PENGELOLA PUSTAKA ELEKTRONIK	6	3.510.400
320	PENGELOLA SARANA PRASARANA RUMAH TANGGA DINAS	6	3.510.400
321	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR	6	3.510.400
322	PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN	6	3.510.400
323	PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN	6	3.510.400
324	PENGELOLA SITUS ATAU WEB	6	3.510.400
325	PENGELOLA STANDAR TEKNOLOGI INFORMASI	6	3.510.400
326	PENGELOLA TERJEMAHAN DAN KERJA SAMA	6	3.510.400
327	PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN	6	3.510.400
328	PENGELOLA WISMA	6	3.510.400
329	PENGOLAH DAFTAR GAJI	6	3.510.400

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
330	PENGOLAH DATA ANGGARAN BELANJA NEGARA	6	3.510.400
331	PENGOLAH DATA APLIKASI DAN PENGELOLAAN DATA SISTEM KEUANGAN	6	3.510.400
332	PENGOLAH DATA INFORMASI DAN HUKUM	6	3.510.400
333	PENGOLAH DATA INTELIJEN	6	3.510.400
334	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN KLASIFIKASI BARANG	6	3.510.400
335	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN	6	3.510.400
336	PENGOLAH DATA LAPORAN REALISASI ANGGARAN	6	3.510.400
337	PENGOLAH DATA MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN	6	3.510.400
338	PENGOLAH DATA PENGANGGARAN	6	3.510.400
339	PENGOLAH DATA PENGELOLAAN KEUANGAN	6	3.510.400
340	PENGOLAH DATA PENYIDIKAN DAN BARANG HASIL PENINDAKAN	6	3.510.400
341	PENGOLAH DATA PERBENDAHARAAN	6	3.510.400
342	PENGOLAH DATA PNBK KEMENTERIAN LEMBAGA	6	3.510.400
343	PENGOLAH DATA SISTEM AKUNTANSI	6	3.510.400
344	PENGOLAH DATA SISTEM INFORMASI DAN DISEMINASI HUKUM	6	3.510.400
345	PENGOLAH INFORMASI MEDIA	6	3.510.400
346	PENGOLAH KONTEN MEDIA SOSIAL	6	3.510.400
347	SEKRETARIS	6	3.510.400
348	PRANATA ACARA	6	3.510.400
349	PRANATA JASMANI DAN MENTAL	6	3.510.400
350	PRANATA KEARSIPAN	6	3.510.400
351	PRANATA SIDIK JARI	6	3.510.400
352	OPERATOR KOMPUTER	5	3.134.250
353	PEMBAUT DAFTAR GAJI	5	3.134.250
354	PEMELIHARA KANTOR	5	3.134.250
355	PEMERIKSA PELANGGARAN TATA TERTIB	5	3.134.250
356	PEMROSES BERKAS PERMOHONAN HARTA PENINGGALAN	5	3.134.250
357	PEMROSES DATA PENYIDIKAN DAN LITIGASI	5	3.134.250
358	PEMROSES IZIN ADVOKAT ASING	5	3.134.250
359	PEMROSES JAMINAN SOSIAL	5	3.134.250
360	PEMROSES LAYANAN HUKUM UMUM	5	3.134.250
361	PEMROSES LEGALISASI	5	3.134.250
362	PEMROSES MUTASI KEPEGAWAIAN	5	3.134.250
363	PEMROSES PENETAPAN PEMBERHENTIAN	5	3.134.250

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	DAN PENSUN		
364	PEMROSES PENETAPAN PENGHAPUSAN PERLENGKAPAN	5	3.134.250
365	PEMROSES PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI	5	3.134.250
366	PEMROSES PENGEMBANGAN METODE PENYULUHAN HUKUM	5	3.134.250
367	PEMROSES PENYELESAIAN SENGKETA, LITIGASI DAN PENYIDIKAN	5	3.134.250
368	PEMROSES PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	5	3.134.250
369	PEMROSES STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA	5	3.134.250
370	PEMROSES URUSAN ADMINISTRASI KOMISI BANDING	5	3.134.250
371	PENATAUSAHAAN	5	3.134.250
372	PENGADMINISTRASI BARANG DAN ATK	5	3.134.250
373	PENGADMINISTRASI BARANG MILIK NEGARA	5	3.134.250
374	PENGADMINISTRASI DATA PERMOHONAN PENDAPAT HUKUM	5	3.134.250
375	PENGADMINISTRASI JAMINAN FIDUSIA	5	3.134.250
376	PENGADMINISTRASI KEBUTUHAN DAN PEMBAKUAN PERLENGKAPAN	5	3.134.250
377	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	3.134.250
378	PENGADMINISTRASI LAYANAN KUNJUNGAN	5	3.134.250
379	PENGADMINISTRASI MANAJEMEN OUTSOURCING TEKNOLOGI INFORMASI	5	3.134.250
380	PENGADMINISTRASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5	3.134.250
381	PENGADMINISTRASI PERJALANAN DINAS	5	3.134.250
382	PENGADMINISTRASI PERLENGKAPAN KEAMANAN	5	3.134.250
383	PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	5	3.134.250
384	PENGADMINISTRASI UMUM	5	3.134.250
385	PENGAMBIL SIDIK JARI	5	3.134.250
386	PENGAWAL TAHANAN/NARAPIDANA	5	3.134.250
387	PENGELOLA ADMINISTRASI DIKLAT	5	3.134.250
388	PENGELOLA DAN PENGOLAH MAKANAN	5	3.134.250
389	PENGELOLA HASIL BELAJAR/EVALUASI PESERTA DIKLAT/PELATIHAN	5	3.134.250
390	PENGELOLA HUKUMAN DISIPLIN	5	3.134.250
391	PENGELOLA KENDARAAN DINAS	5	3.134.250
392	PENGHIMPUN BERITA	5	3.134.250
393	PENGHUBUNG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	3.134.250
394	PENGHUBUNG ANTARLEMBAGA	5	3.134.250

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
395	PENGOLAH ADMINISTRASI PIMPINAN	5	3.134.250
396	PENGOLAH ARSIP DAN DOKUMENTASI	5	3.134.250
397	PENGOLAH ARSIP TERAAN	5	3.134.250
398	PENGOLAH DATA GAJI PEGAWAI	5	3.134.250
399	PENGOLAH DATA INVENTARIS	5	3.134.250
400	PENGOLAH DATA KEGIATAN PENGAMANAN	5	3.134.250
401	PENGOLAH DATA KENDARAAN OPERASIONAL	5	3.134.250
402	PENGOLAH DATA LAPORAN PEMBUKUAN	5	3.134.250
403	PENGOLAH DATA LAPORAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN	5	3.134.250
404	PENGOLAH DATA LAPORAN PENGIRIMAN DAN PENGANGKUTAN PERLENGKAPAN	5	3.134.250
405	PENGOLAH DATA SIDIK JARI	5	3.134.250
406	PENJAGA PINTU UTAMA PEMASYARAKATAN	5	3.134.250
407	PENJAGA TAHANAN	5	3.134.250
408	PENYIAP BAHAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5	3.134.250
409	PENYIAP BAHAN BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERANCANG PERATURAN DAERAH	5	3.134.250
410	PENYIAP BAHAN DISTRIBUSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5	3.134.250
411	PENYIAP BAHAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5	3.134.250
412	PENYIAP BAHAN HUKUM TIDAK TERTULIS	5	3.134.250
413	PENYIAP BAHAN KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM	5	3.134.250
414	PENYIAP BAHAN LAPORAN DAN EVALUASI	5	3.134.250
415	PENYIAP BAHAN LAPORAN HASIL PERTEMUAN ILMIAH	5	3.134.250
416	PENYIAP BAHAN LEGALISASI	5	3.134.250
417	PENYIAP BAHAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI	5	3.134.250
418	PENYIAP BAHAN PEMBELAJARAN	5	3.134.250
419	PENYIAP BAHAN PENELITIAN HUKUM	5	3.134.250
420	PENYIAP BAHAN PENETAPAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL	5	3.134.250
421	PENYIAP BAHAN PENGEMBANGAN JARINGAN INFORMASI HUKUM	5	3.134.250
422	PENYIAP BAHAN PENGEMBANGAN METODE PENYULUHAN HUKUM	5	3.134.250
423	PENYIAP BAHAN PENGEMBANGAN OTOMASI	5	3.134.250
424	PENYIAP BAHAN PENGKAJIAN HUKUM	5	3.134.250
425	PENYIAP BAHAN PENYELENGGARA DIKLAT/PELATIHAN/PENYULUHAN	5	3.134.250

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
426	PENYIAP BAHAN PUBLIKASI	5	3.134.250
427	PENYIAP BAHAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5	3.134.250
428	PENYIAP DATA DAN BAHAN PENGHARMONISASIAN	5	3.134.250
429	PENYIAP DATA DAN PROGRAM LEGISLASI	5	3.134.250
430	PENYIAP DATA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	5	3.134.250
431	PENYIAP DOKUMENTASI NASKAH PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5	3.134.250
432	PENYUSUN ARSIP DAN DOKUMENTASI	5	3.134.250
433	PETUGAS DOKUMENTASI (FOTOGRAFER)	5	3.134.250
434	PETUGAS PENGAMANAN DETENI	5	3.134.250
435	PETUGAS PROTOKOL	5	3.134.250
436	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	5	3.134.250
437	POLISI KHUSUS KEIMIGRASIAN/PEMASYARAKATAN	5	3.134.250
438	SATUAN PENGAMAN TAHANAN/NARAPIDANA	5	3.134.250
439	TEKNISI	5	3.134.250
440	PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA	5	3.134.250
441	PETUGAS KEAMANAN	5	3.134.250
442	PRANATA TEKNOLOGI INFORMASI KOMPUTER	5	3.134.250
443	TEKNISI JARINGAN INSTALASI	5	3.134.250
444	TEKNISI LISTRIK, TELEPON, AC, DAN LIFT	5	3.134.250
445	PENGADMINISTRASI ANGGARAN	5	3.134.250
446	PENGADMINISTRASI DATA PENYAJIAN DAN PUBLIKASI	5	3.134.250
447	PENGADMINISTRASI DATA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5	3.134.250
448	PENGADMINISTRASI HUKUM	5	3.134.250
449	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	3.134.250
450	PENGADMINISTRASI LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING	5	3.134.250
451	PENGADMINISTRASI PARTAI	5	3.134.250
452	PENGADMINISTRASI PELATIHAN	5	3.134.250
453	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	3.134.250
454	PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	5	3.134.250
455	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	5	3.134.250
456	PENGADMINISTRASI REKAM MEDIS DAN INFORMASI	5	3.134.250
457	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	5	3.134.250
458	PENGADMINISTRASI PROGRAM DAN	5	3.134.250

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	KERJASAMA		
459	OPERATOR MESIN	4	2.985.000
460	OPERATOR TELEPON	4	2.985.000
461	PENGELOLA KELENGKAPAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA/TAHANAN	4	2.985.000
462	PRAMU ACARA	4	2.985.000
463	TARUNA AKADEMI	4	2.985.000
464	AGENDARIS	3	2.898.000
465	CARAKA	3	2.898.000
466	PENGEMUDI	3	2.898.000
467	PETUGAS PENGGANDAAN	3	2.898.000
468	PRAMU BAKTI	3	2.898.000

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
 HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2022
 TENTANG
 PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
 KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN, SURAT KETERANGAN, DAN LAPORAN
 RINCIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN

KOP SURAT

SURAT PERMOHONAN IZIN

(Tidak Masuk/Terlambat Masuk Kerja/Pulang Sebelum Waktunya/Tidak
 Berada di Tempat Tugas/Tidak Melakukan Rekam Kehadiran)

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa pada hari..... tanggal saya
 tidak masuk kerja/terlambat masuk kerja/pulang sebelum waktunya/tidak
 berada di tempat tugas/tidak melakukan rekam kehadiran*) karena

Persetujuan atasan langsung, 20.....

.....

*) coret yang tidak perlu.

B. FORMAT SURAT KETERANGAN

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

pada hari..... tanggal tidak masuk kerja/terlambat masuk kerja/pulang sebelum waktunya/tidak berada di tempat tugas/tidak melakukan rekam kehadiran*) karena ada keperluan penting dan mendesak yaitu

....., 20....

Atasan Langsung,

.....
NIP.

*) coret yang tidak perlu.

C. FORMAT LAPORAN RINCIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

KOP SURAT

LAPORAN RINCIAN PEMBAYARAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

1. DATA PEGAWAI

- a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Gol. :
d. Jabatan :

2. CAPAIAN NILAI SKP

- a. Nomor dan tanggal SKP :
b. Periode : Januari – Juli/Juli – Desember (coret salah satu)
c. Nilai SKP :

3. KETAATAN TERHADAP PENENTUAN KEHADIRAN

No	Uraian	Potongan per kejadian	Jumlah Kehadiran	Jumlah Potongan (Rp.)
a	Pegawai tidak masuk kerja/kuliah/belajar dengan alasan yang sah.%		
b	Pegawai terlambat masuk kerja/kuliah/belajar atau pulang sebelum waktunya, atau meninggalkan pekerjaan dan atau kantor pada jam kerja dengan alasan yang sah.%		
c	Pegawai tidak masuk kerja/kuliah/belajar tanpa alasan yang sah%		
d	Pegawai terlambat masuk kerja/kuliah/belajar atau pulang sebelum waktunya, atau meninggalkan pekerjaan, dan/atau kantor pada jam kerja tanpa alasan.%		
JUMLAH				

4. PEMBAYARAN SEHUBUNGAN DENGAN CUTI

No	Uraian Cuti	Pembayaran Tunjangan Kinerja
1	(Uraikan cuti yang dilaksanakan)	(dibayarkan sejumlah ...% selama ... Bulan) sejumlah Rp..... setiap bulannya.

5. PEMBAYARAN SEHUBUNGAN DENGAN CUTI

6.1.	Jumlah bruto	:	Rp.
6.2.	Penyesuaian atas capaian nilai SKP	:	Rp.

6.3.	Penyesuaian atas ketaatan terhadap ketentuan kehadiran	:	Rp.
6.4.	Penyesuaian atas pelaksanaan cuti	:	Rp.
	Jumlah Netto		Rp.

Tanggal : 20...
PEJABAT YANG BERWENANG,

NIP.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY